



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASMAR PANJAITAN**
2. Jabatan : **KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KEMAYORAN**
3. NHK : **439068**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/116 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 86.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 LD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11 AB3C/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 245.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.813.500.000

III. HUTANG Rp. 83.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.730.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.